

**Pandangan Ulama' Jawa Timur  
Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang  
(Perspektif *Maslahah Mursalah*)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan program sarjana strata-satu (S-1)  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS X S-2011 069 M	No. REG : S.2011/M/069
Oleh :	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

FENTI ANTASWITA  
NIM: C02206132

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah

**SURABAYA  
2011**





## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fenti Antaswita ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

JP

**Imam Buchori, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196809262000031001**

Sekretaris,

Sanuri, M.Fil.I  
197601212007101001

Penguji I,



Dr. H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag  
NIP.195808121991031001

Penguji II,

*[Handwritten signature]*

Abdul Hakim, M.E.I  
NIP. 197008042005011003

Pembimbing,

8

**Imam Buchori, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196809262000031001**

Surabaya, 26 Juli 2011

Mengesahkan,

**Fakultas Syariah**

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pandangan Ulama Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang (perspektif *maṣlaḥah mursalah*)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana pandangan ulama jawa timur terhadap hukum jual beli pangan daur ulang dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* tentang hukum jual beli pangan daur ulang.

Dalam rangka menjawab pertanyaan diatas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – analisis dengan pola pikir induktif. Yang diawali dengan memaparkan tentang akad jual beli dan konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbat* dalam hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan tentang makanan, makanan daur ulang dan pandangan ulama Jawa timur terhadap halal haram pangan daur ulang. Setelah itu dilakukan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap hukum jual beli pangan daur ulang dan analisis pandangan ulama Jawa Timur terhadap hukum jual beli pangan daur ulang.

Melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam tidak membolehkan jual beli pangan daur ulang ini karena salah satu syarat dari obyek akad tidak terpenuhi dimana dalam pangan daur ulang tersebut mengandung zat berbahaya dan kondisi ini pada saat terjadi jual beli hanya diketahui oleh pihak penjual sehingga dalam ketentuan hukum Islam jual beli seperti ini mengandung unsur *garar* (penipuan). Begitupun dalam *maṣlaḥah mursalah* yang menurut sebagian ulama Jawa Timur membolehkan karena makanan tersebut yang biasa kita makan. Sedangkan sebagian ulama Jawa Timur tidak membolehkan jual beli pangan daur ulang tersebut, karena pangan daur ulang merupakan pangan yang sudah rusak dan diolah kembali menjadi makanan, sehingga lebih banyak *mudarat* daripada manfaatnya. Antara lain dapat mengakibatkan keracunan, jika dikonsumsi dalam jangka pendek akan mengakibatkan mual dan pusing, jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan mengakibatkan kanker.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya masyarakat sebagai konsumen lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan diri serta keluarga dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi agar terhindar dari penyakit. Bagi pelaku usaha diharapkan memproduksi makanan yang lebih bermanfaat dan tidak membahayakan bagi konsumen.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II AKAD JUAL BELI DAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> SEBAGAI METODE <i>ISTINBAĦ</i> HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Jual Beli .....	17
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
D. Bentuk-bentuk Jual Beli .....	26
E. Akad dalam Jual Beli .....	30
F. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	34



# BAB I

## PENDAHULUAN

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Isi kandungan al-Qur'ān memiliki dua dimensi, yaitu berdimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan khusus tentang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (bersifat *'ubudiyah*). Sedangkan pada dimensi horizontal, al-Qur'ān dengan tegas menekankan hubungan sosial kemasyarakatan (*sosial relation*) antara sesama manusia. Pada dimensi horizontal yang mempunyai corak hubungan kemasyarakatan, penerapan hukum yang terkandung dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Sunnah bersifat fleksibel. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan budaya dan peradaban manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Demikian itu adalah dengan keyakinan seseorang muslim aktifitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah.

Pada sisi lain, bahwa produsen muslim berkeyakinan bahwa hasil usahanya, keuntungan yang diraihny, dan rizqi yang didapatkannya adalah semata-mata karena pertolongan Allah dan takdir.



Para ulama lebih mengkhususkan lagi ruang lingkup pembahasan masalah fiqh pada masalah amaliyah dan mereka mendefinisikan ilmu fiqh sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Sehingga cakupan fiqh Islam hanya membahas masalah-masalah amaliyah seperti shalat, zakat, puasa, haji, nikah, muamalah, siyasah, dan lain-lainnya.

Muamalah merupakan aktifitas yang bersifat horizontal yang di lakukan manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.<sup>2</sup> Semua hukum syari'at yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-  
memberi, dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah muamalah. Jadi, Muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.

Untuk menghindari kesewenag-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur

<sup>2</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pembukuan Islam*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 83

3. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19

hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.

**Firman Allah SWT:**

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan<sup>4</sup>". (QS. Al-Qasas: 28:77)*

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'ān tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum mengatur secara garis besar.<sup>5</sup>

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian peluang dan kekuasaan darinya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2002), 302

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 176

Dari uraian diatas dapat di katakan bahwa semua transaksi baik dalam ibadah ataupun muamalah ada norma hukum yang mengaturnya termaksud transaksi jual beli dalam Islam yang tidak lepas dari rukun, syarat, perjanjian, kerja sama ataupun yang lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli, agar usaha tersebut tidak bertentangan dengan aspek hukum dalam hal ini adalah hukum Islam. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin

keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik menyangkut agama, keselamatan diri, akal dan harta benda.

Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang yang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan minum, walaupun barang tersebut najis.<sup>6</sup>

Seorang muslim seharusnya mengetahui halal haramnya perbuatan yang dilakukannya, dan benda-benda yang digunakannya, untuk memenuhi kebutuhannya termaksud dalam hal pangan yang di daur ulang atau pangan yang tidak layak konsumsi lagi. Akan tetapi penentuan status halal haramnya bukan perkara mudah. Di sisi lain umat Islam belum seluruhnya mengetahui berbagai jenis produk pangan yang di jual dalam kemasan, demikian juga asal usul bahan yang di pergunakan. Di sisi lain pemahaman mereka terhadap syariah Islam, khususnya masalah halal haramnya sesuatu bahan pangan pada umumnya relatif minim.

Persoalan lain juga yang baru-baru muncul dan terangkat untuk  
dibicarakan adalah ketika kita melihat fenomena yang terjadi dan tidak bisa  
dipungkiri kenyataannya baik dari press, media masa, maupun yang lainnya  
memberitahukan bahwa banyak peredaran sisa makanan yang sejatinya sudah

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 125

Dan beberapa waktu yang lalu fenomena ini kembali terjadi berupa makanan ringan seperti snack dan wafer hasil dari daur ulang ini beredar di Jawa Timur.

Secara klasik orang selalu mengatakan bahwa memakan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh badan.<sup>7</sup>

Benda yang dimakan disebut makanan, sedangkan yang diminum disebut minuman. Obyek makanan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewan ataupun nabati, sedangkan obyek minuman lebih tertuju kepada benda-benda cair. Dalam hal ini, kajian makan-makanan yang diturunkan di sini mencakup pula bidang minum.

Untuk memahami bagaimana pandangan Islam tentang obyek yang boleh dimakan atau diminum, ada baiknya dikemukakan bahwa pada dasarnya setiap

7 Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997), 123



Adapun kedudukan tentang pendapat Ulama' Jawa Timur dalam hal ini orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang Islam, dan orang yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, beribadah dan bermuamalah yang di pandang baik atau tidak baik, hanya sebagai acuan atau sebagai pilihan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan bermuamalah.

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Jenis makanan yang dikonsumsi.







1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum jual beli pangan daur ulang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh masyarakat luas khususnya sebagai acuan bagi pelaku bisnis yang memperdagangkan makanan.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagai lazimnya suatu penelitian tentu di harapkan manfaat dan kegunaannya adalah:

1. Secara teoritis dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesis bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui dan menerapkan dan masalah yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jual beli.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli untuk bermuamalah secara Islam.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul: *"Pandangan Ulama' Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang (Study Analisis Metode Istinbat Hukum Islam)*. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini ,maka perlu di jelaskan istilah pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

**Pandangan** : Pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang

bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah dunia ini.

Ulamā' Jawa Timur : Orang terkemuka dan kenamaan dalam bidang Hukum Islam di Jawa Timur.

**Jual Beli** : Transaksi menukarkan barang dengan uang.

**Pangan Daur Ulang** : Makanan kadaluarsa atau makanan yang tidak layak konsumsi yang diolah kembali menjadi pangan yang layak dikonsumsi.

**Metode Istibat Hukum** : Cara pengambilan kesimpulan hukum dari suatu masalah yang belum jelas hukumnya.<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian adalah Pandangan Ulamā' Jawa Timur tentang Hukum jual beli pangan daur ulang.

## 2. Sumber Data

Tempat memperoleh data dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 156



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian ini, maka dalam hal ini di gunakan beberapa tehnik pengumpulan data, sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan.

### **b. Telaah Dokumen**

Telaah dokumen adalah salah satu cara penggalian data melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi pangan yang di daur ulang.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang di tempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang telah di peroleh, adapun metode pengajuan data yang digunakan adalah:

a. Deskriptif

Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan pendapat Ulamā' Jawa Timur tentang Hukum jual beli pangan daur ulang.

### b. Analitis

Yang dimaksud dengan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (keterangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang benar-benarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Pola pikir induktif adalah jalan pikiran (nalar) dari putusan khusus ke putusan umum. Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah jual beli pangan daur ulang berstatus halal atau tidak. Putusan umum dari penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam tentang hal-hal yang diperbolehkan atau yang dilarang atau yang halal, haram serta syubhat.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan, pada bab ini memuat urusan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.**

**BAB II : Bagian ini merupakan kerangka konseptual yang memuat tentang deskripsi masalah yang sedang dikaji berdasarkan dari hasil kajian pustaka.**

- BAB III** : Bab ini akan memaparkan tentang data penelitian yang terdiri dari deskripsi data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam metode dan hasil wawancara yang terbagi dalam ketentuan halal dan tidaknya Pangan Daur Ulang Dan Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang Menurut Pandangan Ulama' Jawa Timur.
- BAB IV** : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang.
- BAB V** : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.





**Sayyid Sabiq mendefinisikan:**

**Artinya:** "Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".

*Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik".*

*Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".*

Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulamā'.

Menurut Jumhur Ulamā' yang dimaksud harta adalah *materi* dan *manfaat*. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan.

Sedangkan Ulama' mazhab Hanafiyah berpendapat, bahwa orang yang dimaksud dengan harta (*al-māl*) adalah *sesuatu yang mempunyai nilai*.

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar-menubar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal dipedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar-menukar barang seperti ini yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter (الْمُقَايَدَة). Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah amat besar.<sup>2</sup>

**Menurut Istilah yang di maksud dengan jual beli adalah<sup>3</sup>:**

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

<sup>2</sup> Ibid., 115

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005)

2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣaruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai syara'.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami, bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki.<sup>4</sup> Allah telah mengajarkan dengan firman-Nya:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (QS. Al-Baqarah: 2:275)<sup>5</sup>.

**Firman Allah SWT:**

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu Untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu ...".* (QS. Al-Baqarah: 2:198)<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Abdul fatah idris dan Abdul Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990): 132

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. J-Art 2010), 35





a. Tentang subyeknya;

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri(bukan dipaksa).

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli atas kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

- 3) Keduanya tidak *mubazir*.

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingannya sendiri.

4) *Balig*

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "belum sempurna akalnya" oleh penafsir ditafsirkan sebagai anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

b. Tentang obyeknya;

Yang dimaksud dengan obyek jual belidini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Perlu diingatkan bahwa barang ini (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.



3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

4) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual(baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5) Mengetahui

Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidaklah sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di tangan(tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

#### D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli menjadi dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu<sup>13</sup>:

<sup>13</sup> M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi*, 128



c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

**d. Jual beli benda najis**

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai darah dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna hakiki menurut syara'.

e. Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Didalam masyarakat kita dikenal uang itu” *uang hangus*” atau ”*uang hilang*” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebut itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak diperjualbelikan.







mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya".<sup>18</sup>

Akad jual beli berarti melepaskan obyek tertentu yang memiliki nilai legal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar-menukar satu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan, walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang-barang yang dibeli itu dilakukan, atau barang-barang dapat diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran harga begitu juga pengantaran barang dilakukan secara langsung.

Sang penjual (*musytari*) dan pembeli (*bay'*) didasarkan pada satu nama yang asli, *al-'Aqid*. *'Aqid* harus mempunyai syarat-syarat:<sup>19</sup>

1. Harus orang yang mumayyiz, yakni orang yang mampu memahami akibat perjanjian dalam perdagangan. Kalau demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak memahami implikasi-implikasi perjanjian perdagangan adalah bukan mumayyiz, dan tidak sah melakukan akad jual beli. Menurut semua Mazhab hukum Islam, kecuali Imam Syafi'i, apabila anak kecil yang melakukan akad jual beli itu sudah mumayyiz adalah sah.
2. Harus mampu menguasai hartanya.

<sup>18</sup> Widya Ningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 93

<sup>19</sup>A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 455-456





الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Bisa juga berarti العدة (sambungan), العهد dan (janji).

## 1. Pengertian umum

## 2. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

[illegible]

تَعْلُقُ كَلَامَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut.<sup>23</sup>

- a. Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih.
- b. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah.
- c. Dan akad anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.

**Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut:**

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123



kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam.

*Kedua*, dimensi moral, yaitu mengkaji secara spesifik tentang etika, yaitu pendidikan dan pembersihan jiwa (mental), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari.

*Ketiga*, dimensi hukum, yaitu meliputi tindakan-tindakan manusia, seperti ibadah, mu'amalah, hukuman dan lain sebagainya yang termasuk dalam kajian ilmu fiqh.<sup>25</sup>

Adapun definisi *maṣlaḥah* berasal dari kata *al-ṣulḥ* atau *al-iṣlah* yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada psikis. *Maṣlaḥat* adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam.

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti lafaz *al-manfaat*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu dari kalimat *maṣḍar* yang artinya dengan kalimat *aṣ-ṣalah*, seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya *al-naḥu*.

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah* itu merupakan bentuk *tunggal* (*mufrad*) dari kata *al-maṣālīh*. Pengarang Kamus Lisan al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-ṣalāḥ* dan *al-maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣlaḥīh*. Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan

<sup>25</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1

dan faedah, ataupun mencegah dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit.<sup>26</sup>

## 2. Macam-macam *Maṣlahah*

Dilihat dari tingkat kebutuhannya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maşlahah Darūriyyah*

*Maṣlaḥah ḍarūriyyah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada<sup>27</sup>.

b. *Maṣlaḥah Ḥajiyyah*

*Maṣlaḥah ḥajjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri<sup>28</sup>.

c. *Maşlahah Tahsiniyyah*

*Maṣlahah Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117

Amir Syrifuddin, *Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2009); 348

<sup>28</sup> *Ibid.*, 349

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Dilihat dari adanya keserasian dan dukungan syara', *maṣlaḥah* dapat

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

*Maṣlahah Mu'tabarah* adalah *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh

b. *Maşlahah Mulgah*

*Maṣlahah Mulgah* adalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* adalah apa yang dianggap baik oleh akal,

### 3. Syarat-Syarat *Maslahah*

Abdu al-Wahhab Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam

a. Sesuatu yang dianggap *masalah* itu haruslah *masalah* yang hakiki yaitu

yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.



mereka ini telah mensyari'atkan aneka ragam hukum di dalam rangka mencari kemaslahatan dan bukan lantaran adanya pengakuan sebagai saksi.

## 5. Syarat-syarat untuk dijadikan Hujjah

Barang siapa yang mengemukakan hujah dengan *Maṣlahah Mursalah*, mereka itu harus berhati-hati, sehingga bagi *tasyri'* bukanlah merupakan pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Untuk ini syarat-syarat yang dibina oleh *tasyri'* itu ada tiga macam syarat<sup>31</sup>.

*Pertama*, adalah *maṣlaḥah* hakikat, bukan *maṣlaḥah* *wahamiah* (angan-angan). Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang *ditasyri'kan* hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang *mudarat*.

*Kedua*, ada kemaslahatan umum. Bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa *tasyri'* hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang *kemudharatan*.

<sup>31</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. RINEKE Cipta, 1993), 101



### BAB III

# PANDANGAN ULAMĀ' JAWA TIMUR TERHADAP MAKANAN DAUR ULANG

### A. Definisi Makanan Dalam Islam

### A. Definisi Makanan Dalam Islam

### A. Definisi Makanan Dalam Islam

<sup>1</sup> Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, (Bandung : Trigenda Karya); 18

<sup>2</sup> Jamaluddin Mahran dan Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan Dan Obat-Obatan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 200

Dalam Islam, seorang mukmin tidak akan hidup tanpa petunjuk. Al-Qur'an menjelaskan nilai-nilai dan norma-norma bagi semua tindakan moral, termasuk makanan dan minuman. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia harus makan yang halal dan menyucikan segala yang ada di muka bumi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata". (QS Al-Baqarah 2:168)<sup>3</sup>*

Ayat ini menjelaskan ajaran umum tentang makanan dan minuman kepada seluruh ummat Islam, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), begitu pula perintah-Nya agar mengikuti perintah-Nya. Makan yang halal lagi baik, yang bergizi, dan lezat rasanya. Semua kualitas ini disebut dengan kata yang ringkas, *tayyib*, sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas. Ajaran dalam ayat tersebut menolak praktek jahiliyah. Semua yang mereka lakukan itu akan merusak, karena berdasarkan khayalan belaka. Apa yang mereka halalkan atau haramkan didasarkan pada hayalan dan nafsu setan mereka sendiri.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Penerbit J-ART, 2010),





Ketika Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk *kemaslahatan* kita. Dan ketika Allah mengharamkan hal-hal yang *khabiis* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk *kemaslahatan* kita.<sup>8</sup>

Sesungguhnya Allah Yang Maha Pemurah memberitahu manusia makanan pokok dan bahan makanan yang bermanfaat baginya, sehingga manusia dapat memanfaatkannya untuk membangun jasmaninya, serta memperoleh energi yang ia butuhkan untuk berbuat dan beraktifitas.

<sup>8</sup> *Ijma' Ulama, Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia*, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009), 84

Di sisi lain, Allah SWT menghalalkan untuk manusia berbagai makanan yang baik, yang diperuntukkan bagi manusia, berupa rezeki dari asalnya yang alamiah, baik nabati maupun hewani.

Makanan pokok bagi kehidupan manusia adalah seperti bahan bakar yang sangat diperlukan oleh mesin. Kedudukannya setara dengan listrik, bensin dan uap, meski ada perbedaan yang cukup signifikan antara kedua-duanya. Seorang manusia beraktifitas secara kontinyu tanpa berhenti sepanjang hayatnya. Walau di waktu tidur dan beristirahat, piranti tubuhnya tetap bekerja tanpa henti. Hal inilah yang menyebabkan ia tidak bisa dibandingkan dengan kerja kontinyu yang dilakukan oleh mesin dan peralatan mekanik, yang kadang bekerja tetapi juga berhenti. Makanan pokok dan makanan lainnya adalah sumber energi yang mutlak diperlukan oleh jasmani untuk melaksanakan aktifitasnya, tugas kehidupannya, serta kerja keseharian lainnya. Makanan pokok menghasilkan kalor di dalam tubuh sebagai hasil oksidasi dan pembakaran bahan makanan. Nilai kalori pada makanan adalah jumlah energi kalor yang terkandung pada







**Tentang makanan dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:**

- Di samping menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan dengan segala dampaknya, Islam juga menjelaskan makanan yang dihalalkan karena bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan.

Makanan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan kita, karena tidak sedikit penyakit yang disebabkan oleh makanan yang kita makan. Semakin berkualitas makanan yang kita makan (dalam hal ini kandungan gizi yang ada dalam makanan) semakin rendah kita terkena suatu penyakit. Kualitas makanan sangat tergantung dari bahan makanan yang digunakan. Makanan yang sehat berasal dari bahan makanan yang sehat pula.

Panganan daur ialah yang dimana pangan yang sudah rusak diolah kembali dan dijadikan pangan layak konsumsi lagi. Yang pada umumnya makanan yang sudah rusak atau tidak layak yang sejatinya harus di buang





#### 4. Produk dalam kaleng

- Badan kaleng rusak seperti penyok, kembung, atau karat
- Kaleng yang berkarat pada bagian luarnya, mungkin juga telah berkarat bagian dalamnya. Reaksi pada umumnya dapat terlihat dari perubahan warna.
- Jika pangan termaksud berasam tinggi atau mengandung belerang (sulfide), perubahan warnanya mengarah kehitaman karena terbentuk besi sulfide (fes.)

## 5. Produk Pangan Beku

- a. Produk pangan beku ini merupakan produk yang memiliki umur simpan tinggi apabila diberi perlakuan penyimpanan yang benar. Penyimpanan terbaik harus dilakukan dalam freezer bersuhu  $-200^{\circ}\text{C}$
- b. Freezer sehari-hari hanya bersuhu  $-50$  hingga  $00^{\circ}\text{C}$ . Sehingga tetap perlu dicantumkan masa kadaluarsa pada beberapa produk pangan beku menurut suhu penyimpanannya.
- c. Dianjurkan untuk tidak terlalu sering membekukan dan thawing (mencairkan). Bila produk tidak dimasak seluruhnya, sebaiknya hanya sebagian saja yang dikeluarkan dari freezer. Ini adalah upaya untuk mencegah masuknya mikroba.



#### E. Pandangan Ulama Jawa Timur : *Pangan Daur Ulang*

Ketahuilah, siapa saja biasa meraih segala yang haram dan yang *syubhat*, jarang sekali akan beroleh *taufiq* (tuntutan dan pengarahan) dari Allah kearah perbuatan amal sholeh. Kalaupun, menurut lahiriahnya, melakukan amal-amal sholeh, namun ia pasti tidak terhindar dari penyakit-penyakit batiniyah yang menghilangkan nilainya seperti *ujub* (pongah dan congkak) serta *riya'* (ingin dipuji). Bagaimanapun, siapa saja yang memakan makan yang haram, pasti amalnya tertolak, sebab Allah adalah maha baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Penjelasan nya ialah bahwa setiap amal tidak mungkin dibayangkan dapat terjadi kecuali dengan gerakan-gerakan anggota tubuh, sedangkan gerakan-gerakan anggota tubuh tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya kekuatan (energi) yang bersumber dari makanan. Karena itu, apabila makanan itu buruk, semua kekuatan dan gerakan yang berasal darinya pasti buruk pula.

Yang dianjurkan dalam Islam semua makanan halal dan *tayyib*, jika terjadi yang seperti ini (pangan daur ulang) maka ini dinamakan menyimpang dari syari'ah, kalau dalam syari'ah jelas tidak boleh, karna makanan tersebut tidak *tayyib*, dalilnya:

كلوا واشربوا حلالا طيبا

**Artinya:** Makan dan minumlah yang halal serta *tayyib*



## F. Pandangan Ulama' Jawa Timur: Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang

Jual beli dalam Islam ada istilahnya keadilan yaitu mengikuti kewajiban syari'ah yang dimana meliputi ijab qabul, Transparan, saling menguntungkan, kalau *ihsan* dalam keadilan yaitu yang beli diuntungkan dengan lebih. Jual beli yang bermanfaat lebih baik, dan jual beli yang mengandung *muḍarat* jelas tidak boleh. Ketika terdapat *maṣlaḥat* untuk pupuk atau tidak dikonsumsi oleh manusia jelas itu diperbolehkan dan manfaat.

Berarti jual beli pangan daur ulang yang seperti ini haram karena barang yang diperjual belikan tidak transparan atau mengandung unsur penipuan.

Jual Beli itu sah atau haram dilihat dari barangnya, harganya, bukan barang najis, bukan hal yang *muḍarat*. Bukan di daur ulangnya melainkan proses dan bahannya. Kalau bahannya suci dan proses yang steril maka halal, maka itu dikembalikan kepada asalnya. Makanan yang terbuat dari daur ulang bahan dan prosesnya itu benar maka diperbolehkan dan apabila mengandung *muḍarat* dan berbahaya maka itu diharamkan<sup>16</sup>.

Makanan yang di daur ulang ini sebenarnya halal, tapi dia tidak *tayyib*, jadi letak yang haram itu berada di *tayyib*, karena makanan yang tidak *tayyib* menimbulkan kerugian pada manusia. Dan hal ini mengandung tipuan, ketika mengatakan barang yang dijual itu baik dan pembeli membelinya maka itu

<sup>16</sup> Abdurrahman Navis, *wawancara*, Gedung Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2 Mei 2011





# ANALISIS PANDANGAN ULAMA' JAWA TIMUR TERHADAP HUKUM JUAL BELI PANGAN DAUR ULANG (PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*)

*Maṣlaḥah mursalah* bukanlah *maṣlaḥah* yang dilatarbelakangi oleh kebebasan berpendapat yang dilandasi oleh emosi dan keinginan hawa nafsu, akan tetapi ia merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dan senafas dengan tujuan syar'i. Yang menjadi permasalahan, bagaimanakah konsekwensinya jika terdapat suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam agama, apakah perbuatan itu haram atau apa boleh?

Menolak *maṣlaḥah*, berarti membekukan syari'ah, karena aneka *maṣlaḥah* yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada sesuatu dalil yang tertentu.

[illegible]



manusia dan utusannya yang menyempurnakan akhlaq. Dan jika *maṣlaḥah mursalah* tersebut tidak digunakan dalam menentukan sebuah hukum maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

*Masalah mursalah* terhadap Hukum jual beli pangan daur ulang merupakan hukum jual beli yang halal,<sup>1</sup> dan tidak bertentangan dengan nash. yang dimana pangan tersebut yang biasa kita nikmati dan memakannya dalam keseharian, akan tetapi pangan yang kita pangan tersebut ada yang sudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi dan pangan tersebut diolah kembali untuk dijadikan konsumsi, yang dimana pangan yang sudah rusak tersebut sudah mengandung unsur dan bahan yang berbahaya dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi yang mengkonsumsinya. Jadi solusinya adalah setiap pedagang dan pengecer wajib menerapkan sistem dan cara penelusuran asal muasal barang sehingga tidak terjadi kecerobohan dalam membuat, menjual pangan untuk dikonsumsi masyarakat luas, pangan yang rusak ditetapkan pada pertimbangan keamanan dan mutu. Kalau mutunya rusak sebelum masalah keamanannya timbul maka tidak akan keracunan, tapi kalau kita mengkonsumsinya maka itu akan berbahaya. Jadi walaupun asal mulanya pangan itu baik dan halal, ketika pangan yang rusak di daur ulang dan diolah kembali terdapat kandungan bakteri dan jamur yang sangat membahayakan kesehatan. Jadi apapun jenis makanannya, jika sudah rusak tentu tidak layak dikonsumsi, jika makanan daur ulang itu

<sup>1</sup> Imam Buchori, *wawancara*, Babatan Pilang II/2 Wiyung, Surabaya, 22 Desember 2010





tetap berdasar dan berlandas pada nash meski meski hanya bersifat kulli. Rumusan-rumusan hukum yang dihasilkannya sudah merupakan cermin dari azaz *tasyri'* Islam. Sehingga tidaklah berlebihan bahwa andil dan peranan *maṣlaḥah mursalah* cukuplah berarti dalam percaturan *tasyri'* Islam.

*Maṣlaḥah mursalah*, meskipun secara formal tidak dipengaruhi oleh ulamā' Indonesia, namun dalam praktek menunjukkan bahwa mereka mempergunakannya dan mempraktekkannya. Dengan demikian secara faktual tampak jelas bahwa *maṣlaḥah mursalah* mempunyai peranan yang penting dan berarti dalam pembinaan dan penggambaran hukum di Indonesia.

Selain ketentuan-ketentuan hukum produk pemerintah, perlu dikemukakan keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, MUI, dan Ulama' lainnya, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pembinaan hukum Islam. Namun disini penulis hanya akan mengemukakan secara global tentang kasus-kasus tertentu yang keputusannya didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*).

Sebagai akibat modernisasi dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kasus-kasus baru yang tentunya memerlukan status hukum, contoh: bayi tabung, donor darah, operasi plastik, daging ayam yang disuntik air, daging berformalin sampai ikan diberi pemutih dan yang terakhir adalah makanan yang sudah rusak dan di daur ulang (diolah kembali) dan kita







## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Penggunaan metode *maṣlahah mursalah* terhadap hukum jual beli pangan daur ulang merupakan hukum jual beli yang halal, dan tidak bertentangan dengan nash, dimana pangan tersebut yang biasa kita nikmati dan kita makan dalam keseharian, akan tetapi pangan yang kita makan tersebut ada yang sudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi dan pangan tersebut diolah kembali untuk dijadikan konsumsi. Padahal pangan yang sudah rusak tersebut sudah mengandung unsur dan bahan yang berbahaya dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi yang mengkonsumsinya. Karena dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi pangan tersebut mengandung *mudarat*, maka hukum jual beli pangan daur ulang tersebut haram.
2. Pandangan Ulama' Jawa Timur terhadap hukum jual beli Pangan daur ulang ini halal tapi tidak *ṭayyib* yang dimana pada makanan tersebut mengandung *mudarat*. Jika penjual mengatakan dengan jujur bahwa makanan yang diproduksi itu berupa daur ulang dan sudah diseleksi oleh BPOM maka jual beli tersebut halal, jadi masalah kehalalan tergantung pada kejujuran sang penjual.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi konsumen, diharapkan lebih hati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Karena jika salah memilih makanan yang sudah rusak, maka akan menyebabkan berbagai penyakit.
2. Bagi para ulama' diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh syari'at Islam.
3. Kepada Balai POM, diharapkan lebih teliti dalam menyeleksi makanan yang akan dipasarkan ke masyarakat agar makanan yang dipasarkan di masyarakat benar-benar makanan yang tidak mengandung bahaya.
4. Bagi para penjual diharapkan kejujurannya, jika makanan yang dijual tersebut adalah makanan daur ulang maka harus dikatakan dengan jujur.



- Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, cetakan I, 1997
- Muhammad Ali as-Saayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Saiful Ibad, *Fiqh Progresif*, Jakarta: FKKU Press: 2003
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Satria Effendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, Jakarta : Prenada Media, cetakan I, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cetakan I, 2006
- Widya Ningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Syaiful Ummah, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Barang-Barang Bermelamin, Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel*, 2009
- A. Koey, *Waspadai Prodk Makanan Kadaluarsa*, dalam: <http://www.nuakoey.com/2010/07/waspadai-produk-makanan-kadaluarsa.html> diakses 19 Juli 2010